



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG**
2. Jabatan : **STAF AHLI MENTERI BIDANG PENGEMBANGAN BIO INDUSTRI**
3. NHK : **279212**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.139.810.000**

1. Tanah Seluas 8252 m2 di KENDARI, WARISAN Rp. 60.630.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2760 m2/315 m2 di KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 976.000.000
3. Tanah Seluas 18386 m2 di KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 91.930.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KENDARI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
7. Tanah Seluas 8240 m2 di KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
8. Tanah Seluas 7250 m2 di KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 36.250.000
9. Tanah Seluas 264 m2 di KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/250 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 45.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	154.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	869.395.982
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.208.805.982
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.208.805.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.